

BAB IV

KEBIJAKAN MALADEWA DALAM PENGEMBANGAN BIDANG PARIWISATA PERIODE 2008-2018

Berbagai pencapaian Maladewa dalam pengembangan bidang pariwisata ternyata tidak lepas dari berbagai strategi dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*decision maker*). Kemudian pada sisi yang lain, masyarakat, swasta hingga pelaku usaha juga dilibatkan dalam berbagai kebijakan pengembangan pariwisata nasional sejak tahun 2008. Secara garis besar kebijakan ini dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing adalah kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri.

Kebijakan pemerintah Maladewa bersama dengan stakeholder lainnya memang memiliki beberapa perbedaan antara sebelum tahun 2008 dan pasca tahun 2008. Beberapa kebijakan sebelum tahun 2008 lebih berorientasi pada teknis pariwisata dan pemenuhan atas regulasi internasional, sedangkan pasca tahun 2008 kebijakan ini berorientasi pada promosi terintegrasi dalam lingkup regional dan internasional, serta memenuhi unsur politik dan pelibatan kalangan non-pemerintah, termasuk sektor swasta, masyarakat dan instansi pendidikan tinggi di Maladewa.

Implementasi kebijakan dalam negeri ini meliputi pengembangan pariwisata nasional Maladewa meliputi upaya dalam membangun stabilitas/kondusifitas politik-keamanan domestik dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Kemudian kebijakan luar negeri meliputi kerangka G to G (*government to government*) dan G to B (*government to bussiness*) melalui investasi dan pengembangan pariwisata internasional terintegrasi, serta promosi luar negeri. Gambaran tentang berbagai kebijakan Maladewa terhadap pengembangan bidang pariwisata ini akan diuraikan pada bab IV sebagai berikut:

A. Kebijakan Dalam Negeri

Dalam pariwisata moderen pelibatan berbagai kalangan di luar aktor-aktor formal (pemerintah) menjadi bagian penting dalam menentukan kesuksesan pariwisata pada suatu daerah. Hal ini disebabkan dengan semakin majunya liberalisme internasional maka peran negara tidak akan cukup dalam memberikan berbagai layanan dan akomodasi bidang pariwisata tanpa melibatkan kalangan masyarakat, bersama dengan unit-unit produksinya, termasuk perhotelan, restoran jasa transportasi dan lain-lainnya. Selain itu, pariwisata memerlukan serangkaian dukungan kebijakan diantaranya adalah stabilitas politik dan keamanan untuk dapat menjamin *human security* para wisatawan mancanegara.

Kebijakan dalam negeri dalam pengembangan pariwisata juga berlaku bagi Maladewa. Sejak tahun 2008 negara ini begitu sangat serius dalam mengembangkan stabilitas politik dan keamanan dengan mengedepankan konsep demokrasi konsosiasional yaitu pembagian kekuasaan dan mengedepankan kepentingan nasional bukan individu ataupun kelompok. Kebijakan dalam negeri selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur, serta pelibatan masyarakat sebagai subyek (pelaku pariwisata) dan bukan obyek pariwisata yang dikenal dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT).

1. Pembangunan Stabilitas Politik-Keamanan Domestik Maladewa

Keamanan internasional di era globalisasi masih tetap merupakan isu yang sangat penting sekalipun perang dingin telah berakhir lebih dari dua dekade yang lalu. Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang kemandirian negara, melainkan juga berkaitan dengan keamanan manusia. Dalam pandangan konvensional, masalah keamanan biasanya dipersepsikan dan di tangani dalam konteks hubungan antarnegara. Artinya, bagaimana menjaga dan melindungi keamanan suatu negara dari ancaman pihak lain,

khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer yang berasal dari negara lain.

Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik, masih sangat rendah dan terkadang hukum yang berlaku tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi wisatawan. Sampai saat ini para wisatawan hanya menjadi obyek oleh pelaku bisnis pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Ini menjadi perhatian penting, bahwa sangat di perlukan sebuah peraturan yang tidak hanya membahas tentang kepariwisataan tetapi juga perlindungan terhadap para wisatawan dari segala hal baik menyangkut aspek perjalanan, penginapan, obyek-obyek atau tujuan wisata dan pengaturan hak dan kewajiban wisatawan.⁶⁷

Isu mengenai stabilitas keamanan menjadi prioritas bagi kepemimpinan Presiden Mohammed Waheed Hassan yang dilanjutkan dengan kepemimpinan Abdullah Yameen. Ketika pergantian kepemimpinan pada 17 November 2013 pada Parlemen Maladewa Waheed Hassan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Abdullah Yamen bersama dengan Partai Nasional Bersatu Maladewa (*Maldives National Unity Party*). Fenomena ini ternyata tidak lazim terjadi dalam konstelasi politik Maladewa karena selama ini antara *Maldives National Unity Party* dengan Partai Progresif Maladewa (*Maldives Progresiff Party*) merupakan dua partai yang saling bersaing dalam memperebutkan suara pada setiap pemilu Maladewa.⁶⁸

Dukungan Waheed Hassan terhadap Abdullah Yamnen dapat dilihat dari pernyataannya pada pelantikan presiden penggantinya di parlemen Male, bahwa :

“...there is nothing more important for the future development of the Maldives. To that end, the

⁶⁷ Tourism Maldives, “Maldives Tourism Act”, tersedia online dalam [https://www.tourism.gov.mv/downloads/Tourism_Act\(Law2-99\).pdf](https://www.tourism.gov.mv/downloads/Tourism_Act(Law2-99).pdf), diakses pada tanggal 23 Juni 2019.

⁶⁸ Ibid.

competition in obtaining a base of supporters will be allocated in the building the future together. The turmoil of the community become important lessons that actually does need to happen and together maintain national stability, especially to promote tourism.”⁶⁹

(Tidak ada yang lebih penting bagi pembangunan masa depan Maladewa. Untuk itu, persaingan dalam memperoleh basis pendukung akan dialokasikan dalam membangun masa depan bersama. Gejolak masyarakat menjadi pelajaran penting yang sebenarnya tidak perlu untuk terjadi dan bersama menjaga stabilitas nasional, khususnya untuk memajukan pariwisata)

Pernyataan di atas membuktikan bahwa di tingkat eksekutif dan yudikatif sepakat bahwa pengembangan pariwisata menjadi lebih penting dibandingkan dengan persaingan politik. Ini menjadi modal penting kebijakan Maladewa dalam menjaga konsistensi kunjungan wisatawan asing yang cukup rentan akibat gejolak politik dalam negeri.

Kemudian langkah selanjutnya bagi pemerintah Maladewa dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri juga dijalankan dengan merevitalisasi fungsi kepolisian nasional yang di dukung oleh angkatan bersenjata dari semua angkatan. Beberapa skema kebijakan keamanan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ Sunday Times, “Tourism Largely Unaffected By Maldivian Political Crisis”, tersedia online dalam <http://www.sundaytimes.lk/120212/BusinessTimes/bt22.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019.

⁷⁰ One Online, “Defense Minister: Government Policy to Keep Maldives Strog Country”, tersedia online dalam <https://oneonline.mv/en/6549>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019.

- a. Memfungsikan kepolisian di semua daerah untuk memberikan pelayanan dan respon cepat (*quick response*) terhadap keluhan dan laporan para wisatawan mancanegara. Pada tahap pertama di tahun 2012 kebijakan ini dijalankan dengan memfungsikan empat wilayah meliputi *upper north police division*, *north central police division*, *upper south police division* dan *south police division* dan selanjutnya di tahun 2015 seluruh instansi kepolisian Maladewa akan siap memberikan layanan dan respon cepat kepada wisatawan mancanegara.
- b. Memfungsikan angkatan bersenjata Maladewa untuk dapat menjadi aktor pendukung dalam evakuasi darurat, pengiriman bahan pangan dan kebutuhan pokok ketika cuaca tidak membaik, diantaranya badai ataupun ombak besar dan lain-lainnya. Upaya ini melibatkan satuan *Maldivian Coast Guard* yang di dukung kapal cepat, *surveillance vessel*, serta pelayanan transportasi yang di dukung oleh beberapa helikopter jenis Hal Druvh.

2. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Infrastruktur pariwisata memiliki peranan penting untuk memberikan layanan prima kepada wisatawan mancanegara, sekaligus sebagai *comparatives advantages* dari negara lain. Sejak tahun 2008 pemerintah Maladewa berupaya mengembangkan infrastruktur untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan asing untuk dapat tinggal lebih lama. Hal ini penting karena rata-rata kunjungan dan lama tinggal wisatawan asing hanya sekitar 3-4 hari. Untuk itu pada tahun 2014 pemerintah menyatakan program 15.000 tempat tidur (15.000 *sleeping bed*).⁷¹

⁷¹ “Jaring Wisatawan Asing, Maladewa Terapkan 15.000 tempat tidur”, *Republika*, 8 November 2015.

Program 15.000 *sleeping bed* dijalankan karena kurangnya hotel, cottage ataupun bungalow yang tersebar di berbagai wilayah Maladewa ketika liburan musim panas tiba. Di lain pihak, untuk membangun sebuah hotel terpadu berskala besar tentunya akan membutuhkan banyak anggaran. Disinilah pemerintah Maladewa menawarkan investor asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan hotel ataupun cottage untuk memenuhi 15.000 *sleeping bed*. Selain itu, pemerintah Maladewa juga mengajak masyarakat untuk dapat menyediakan hunian sebagai *guest house* ketika terjadi lonjakan kunjungan wisatawan asing.⁷²

Pengembangan infrastruktur selanjutnya adalah perbaikan bandara udara Velana, meliputi pengisian bahan bakar hingga apron. Upaya ini ditempuh agar bandara ini dapat meningkatkan angka pelayanan lalu lintas pesawat internasional.⁷³ Gambaran mengenai perencanaan pengembangan bandara ini lihat gambar 4.1. sebagai berikut:

Gambar 4.1.

Program Pengembangan Infrastruktur Bandara Velana



Sumber: diolah dari Maldives Independent, "President Launches US 400 M Airport Runaway Project", tersedia online dalam <https://maldivesindependent.com/business/president-launches-us400m-airport-runway-project-129040>, diakses tanggal 29 Mei 2019.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Maldives Independent, "New Run Away Construction Begins at Maldives International Airport", tersedia online dalam <https://maldivesindependent.com/business/new-runway-construction-begins-at-maldives-international-airport-136515>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019.

Kemudian Pada tahun 2014 hingga 2015 Pemerintah Maladewa dengan anggaran pembangunan dalam negeri dan melalui kerjasama internasional juga akan memperbaiki dan mengembangkan bandara-bandara lainnya, meliputi:

- a. Bandara Dhalu yang terletak di wilayah Kudahohado meliputi apron, ruang tunggu dan cargo terminal sehingga dapat didarati oleh maskapai asing dengan pesawat berbadan besar. Dalam kerjasama ini pemerintah China melalui Presiden Bank of China Li Hui berhasil mengalokasikan anggaran sebesar 8,1 juta US Dollar bersama dengan pengembangan Bandara Ba'a.⁷⁴
- b. Bandara Ba'a yang terletak di wilayah Dharavadho meliputi apron, ruang tunggu, pengisian bahan bakar terintegrasi dan cargo terminal sehingga dapat didarati oleh maskapai asing dengan pesawat berbadan sedang dan besar. Peran pemerintah China dalam pengembangan infrastruktur ini adalah dengan memberikan bantuan pinjaman lunak (*soft loan*) yang diberikan oleh Bank of China melalui penandatanganan kesepakatan antara Presiden Bank of China Li Hui dengan Presiden Maladewa Abdulah Yameen pada 9 Oktober 2015. Bantuan China ini merupakan yang terbesar sepanjang kerjasama bilateral antara China dan Maladewa yang nantinya mendorong peningkatan lalu lintas maskapai internasional dari dan ke Maladewa melalui kota Dharavadho.

⁷⁴ Independent, "President Launches US 400 M Airport Runway Project", tersedia online dalam <https://maldivesindependent.com/business/president-launches-us400m-airport-runway-project-129040>, diakses tanggal 29 Mei 2019.

3. Pelibatan Masyarakat dan Swasta Dalam Negeri

Masyarakat merupakan elemen penting bagi penyelenggaraan perekonomian negara. Jika pada sektor industri ataupun manufaktur kaum kapitalis dan pekerja dapat mendominasi, namun pada sektor pariwisata cenderung inklusif (terbuka), dimana masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kehidupan pariwisata yang pada akhirnya dapat mengambil manfaat dalam jangka panjang. Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT).⁷⁵

Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Konsep *Community Based Tourism* (CBT) lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai partner industri pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada para wisatawan. Trend dunia global saat ini pengembangan *community based Tourism* telah dibakukan sebagai alat dan strategi pembangunan tidak hanya terbatas di bidang pariwisata, melainkan dalam konteks pembangunan Negara, dengan membuka kesempatan dan akses komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini juga berlaku bagi pemerintah Maladewa dalam melibatkan masyarakat untuk dapat mengambil peranan sebagai penyedia layanan

⁷⁵ Retilendsisland, "Maldives Matter Project", tersedia online dalam <http://www.resilientisland.com/maldivesmatterproject/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

wisata, seperti yang terjadi di wilayah Gan, Hulhule ataupun masyarakat di sekitar Museum Nasional yang dapat mengembangkan industri kreatif berupa olahan tekstil, pakaian, perhiasan dan lain-lainnya sebagai cinderamata.⁷⁶

Community Based Tourism adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep *Community Based Tourism*, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata, untuk itu para individu diberi keterampilan untuk mengembangkan *small business*.

Model pendekatan masyarakat (*community approach*) menjadi standar baku bagi proses pengembangan pariwisata di negara-negara dunia ketiga, seperti halnya Maladewa, dimana melibatkan masyarakat didalamnya adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan produk wisata. Pemerintah Maladewa kemudian memberikan *guidelines* model bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yakni:

- a. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal (resident) yang akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Maladewa.
- b. Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal untuk dapat memberikan layanan kepada wisatawan mancanegara di Maladewa.
- c. Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan, meskipun dalam jumlah kecil diantaranya pada sektor properti ataupun pengembangan bungalow yang tersebar di berbagai wilayah Maladewa.
- d. Partisipasi penduduk dalam event-event dan kegiatan yang luas, sebagai event kesenian yang digelar di

⁷⁶ *Ibid.*

Male sebagai pertunjukan rakyat di Maladewa (*folk art*).

- e. Produk wisata untuk menggambarkan identitas lokal yaitu Maladewa sebagai negara tropis dan maritim.
- f. Mengatasi masalah-masalah yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh dengan melibatkan akademisi, budayawan hingga instansi-instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata Maladewa.

Pelibatan masyarakat sebagai pengembangan paariwisata di Maladewa juga mengikutseratakan beberapa perguruan tinggi dalam negeri Maladewa, diantaranya Maldives National University ataupun Mandhu College dan Villa College sebagai upaya nyata dalam mengembangkan pengetahuan dan pembangunan pariwisata nasional. Kebijakan ini meliputi pemahaman terhadap pemahaman tentang hak-hak para wisatawan mancanegara, pelatihan skill tentang akomodasi pariwisata hingga linguistik.⁷⁷

B. Kebijakan Luar Negeri

Kerjasama luar negeri memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Melalui kerjasama luar negeri sebuah negara dapat mengambil manfaat, pada bidang assistensi, bantuan modal, fasilitasi hingga pengiriman tenaga ahli. Hal ini juga berlaku bagi Maladewa dalam pengembangan sektor pariwisata nasional. Kerjasama ini meliputi negara dengan negara (G to G), negara dengan swasta (G to B) dan promosi luar negeri.

⁷⁷ MNU, “Course of Tourism Study”, tersedia online dalam <http://mnu.edu.mv/courses/page/2/?f=Faculty%20of%20Hospitality%20and%20Tourism%20Studies>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

1. Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka G to G (Government to Government)

SAARC merupakan organisasi kerjasama kawasan di Asia Selatan. Organisasi ini didirikan pada 1985 dan hingga saat ini beranggotakan delapan negara, masing-masing India, Pakistan, Srilanka, Afghanistan, Maladewa, Nepal, Bangladesh dan Bhutan. Lebih dari itu, SAARC juga menjalankan kebijakan jangka panjang berupa perlindungan ekosistem dan lingkungan hingga penanganan perubahan iklim (*climate change*).⁷⁸

SAARC memiliki peran penting dalam pengembangan bidang pariwisata nasional Maladewa. Hal ini tercermin dari Sidan SAARC di Kolombo, Srilanka pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pariwisata akan menjadi prioritas negara-negara SAARC untuk memajukan kepentingan bersama. Melalui forum ini negara-negara anggota SAARC dapat mengembangkan pariwisata terintegrasi, sehingga para wisatawan mancanegara dapat mengunjungi negara-negara anggotanya secara menyeluruh melalui paket wisata yang lebih terjangkau.⁷⁹

Kerjasama lainnya dijalankan oleh pemerintah Maladewa dengan pemerintah China (Tiongkok). Pada tahun 2016 pemerintah China melalui Perdana Menteri Xi Jinping berhasil bertemu dengan Abdulah Yameen di ibukota Malee. Dalam pertemuan ini pemerintah China sepakat untuk memberikan bantuan anggaran dalam pengembangan infrastruktur berupa bandar udara di Maladewa.⁸⁰

⁷⁸ Tourism Ministry, “Maldives Tourism Ministry”, tersedia online dalam <https://www.tourism.gov.mv/wp-content/uploads/2015/05/Master-Plan-Volume-2.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juni 2019.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ The Diplomat, “China-Maldives Connection”, tersedia online dalam <https://thediplomat.com/2018/01/the-china-maldives-connection/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2019.

Kerjasama lainnya dalam pengembangan sektor pariwisata dalam kerangka G to G pasca tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara Maladewa di bawah kepemimpinan Abdullah Yameen dengan pemerintah India. Kerjasama ini meliputi perbankan, kerjasama pasar bebas dan pariwisata yang diawali oleh kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke ibukota Male untuk bertemu dengan presiden Abdullah Yamen yang kemudian ditindaklanjuti dengan diratifikasinya 3 kesepakatan oleh kementerian kedua negara.⁸¹
- b. Kerjasama antara Maladewa di bawah kepemimpinan Abdullah Yameen dengan pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Abdullah Badawi. Dalam pertemuan ini pemerintah kedua negara sepakat untuk membangun kerjasama pariwisata terintegrasi termasuk pembukaan jalur transportasi udara Kuala Lumpur dan Male pada tahun 2014 dengan melibatkan Air Asia dan Malaysian Airlines.⁸² Kedua belah pihak juga akan merencanakan kerjasama pengembangan perekonomian syariah agar dapat menjadi tolok ukur kemajuan peradaban pariwisata Islam di wilayah Asia-Oceania.
- c. Kerjasama antara Maladewa di bawah kepemimpinan Abdullah Yameen dengan pemerintah Srilanka. Kerjasama bidang pariwisata ini dijalankan untuk mengembangkan IOTWS (*Indian Ocean Tsunami Warning System*) yang telah dirintis tahun 2005, namun baru dapat dikembangkan secara luas pada

⁸¹ The Diplomat, "The New Chapter of India-Maldives Relations", tersedia online dalam <https://thediplomat.com/2018/12/a-new-chapter-in-india-maldives-relations/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

⁸² Revolvly, "Malaysian-Maldives Relations", tersedia online dalam <https://www.revolvly.com/page/Malaysia%E2%80%93Maldives-relations>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

enam titik Maladewa dan Srilanka pada tahun 2015. Upaya ini dijalankan agar dapat menjadi deteksi dini untuk memberikan keamanan dalam negeri, termasuk wisatawan internasional di Maladewa.⁸³

2. Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka G to B (Government to Business)

Kerjasama luar negeri memiliki peranan yang penting dalam menentukan pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Ini disebabkan karena sumber daya alam, anggaran ataupun manusia sifatnya adalah terbatas, sedangkan kepentingan nasional sifatnya adalah terbatas. Pada era liberalisme internasional kerjasama internasional mampu berkembang luas bukan hanya pada level negara, namun juga dengan sektor swasta asing.

The Body Shop sendiri didirikan oleh Anita Roddick dengan membuka toko pertamanya pada tanggal 26 maret 1976 di Brington, Inggris. *The Body Shop* memulai perjalanan publik pada tahun 1985, dan pada tahun 1986 memutuskan untuk membentuk Dapertemen Proyek Lingkungan dengan menciptakan kampanye pertama yaitu “*Save The Whales*” melalui kerjasamanya dengan *Green Peace*. Dan pada tahun 1990 *The Body Shop* mendirikan *The Body Shop Foundation*. *The Body Shop Foundation* bertujuan untuk memberi dukungan finansial kepada kelompok atau organisasi yang mengaruh perhatian besar terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Tahun 1997, *The Body Shop* menjadi perusahaan kosmetik internasional pertama yang menandatangani *Humane Cosmetic Standar* yang didukung oleh kelompok internasional perlindungan hewan. Satu tahun setelahnya dalam memperingati 50 tahun hari jadi *Universal Declaration of Human Rights*, *The Body Shop* melakukan kampanye bersama dengan Amnesty Internasional untuk

⁸³ ADPC, “IOTWS Programe Summary”, tersedia online dalam <https://web.archive.org/web/20090911075428/http://apps.develebrid.ge.net/usiotws/pageaahome.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

mendukung para pejuang hak asasi manusia di seluruh dunia.
84

Upaya *The Body Shop Foundation* dalam mendukung *fair trade* merupakan bagian dari skema *building of future*, yang di dalamnya terdapat beberapa strategi, diantaranya perlindungan satwa, perlindungan lingkungan hidup internasional dan penegakan supremasi HAM. Berbagai upaya ini dijalankan di berbagai negara dunia, khususnya kelompok negara dunia ketiga (negara berkembang).

Keberadaan *The Body Shop* memiliki peranan penting dalam memberikan pelatihan kepada para pengusaha kecil dan menengah, perempuan Maladeewa hingga menyediakan jalur pemasaran dalam negeri atas produk-produk kerajinan usaha kecil menengah tersebut. *The Body Shop* juga berupaya memperkenalkan pada pangsa pasar internasional, diantaranya rempah-rempah jenis ambergins (mahagahru), coco de mer dan olahan hasil pertanian.

Swisscontact merupakan organisasi swasta yang didirikan pada tahun 1959 di Zurich. Program ini masuk ke Maladewa sejak tahun 2006. Lembaga ini mempunyai reputasi baik dengan pendekatan-pendekatannya yang inovatif dan pragmatis dalam bidang pendidikan dan pelatihan, ekologi perkotaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil hingga Menengah. Tujuan utama dari *swisscontact* adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Maladewa melalui *sustainable tourism* yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan mata pencarian penduduk Maladewa.

⁸⁴ The Guardian, "A Brief History of The Body Shop", tersedia online dalam <https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/nov/21/brief-history-of-body-shop>, diakses tanggal 30 Mei 2019.

3. Pengembangan Integrasi Pariwisata Internasional dan Promosi Luar Negeri

Promosi pariwisata memiliki peranan penting dalam mendukung kemajuan pariwisata suatu negara. Di era globalisasi promosi pariwisata tidak lagi efektif jika hanya dijalankan melalui strategi konvensional, namun promosi pariwisata harus terintegrasi termasuk menggunakan media internet dan media sosial, serta melalui pembentukan duta pariwisata (*goodwill ambassadors*).⁸⁵ Konsep promosi pariwisata ini dijalankan oleh berbagai negara dunia, termasuk Maladewa.

Promosi yang dijalankan oleh pemerintah Maladewa dijalankan melalui program kunjungan wisata bertajuk “*Visit of Maldives: Sunny of Side of Life*”. Agenda ini disahkan oleh Kementerian Pariwisata Maladewa Maryam Zulfa sejak tahun 2012. Promosi ini dijalankan dengan menyajikan informasi awal tentang Maladewa pada web site resmi yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian agenda ini juga dijalankan melalui penyebaran layout dan brosur melalui kerjasama dengan maskapai-maskapai dunia, diantaranya Qoantas, Silk Air, Singapore Air dan Emirates.⁸⁶

Promosi selanjutnya dijalankan pemerintah Maladewa dengan membentuk duta pariwisata internasional, diantaranya adalah Mohammed Ajufan Najih yang merupakan artis ternama di Maladewa. Ajufan kemudian menjadi tokoh penting untuk menyebarluaskan informasi tentang pariwisata Maladewa di luar negeri. Di tahun 2016 duta pariwisata internasional ditambah oleh pemerintah Maladewa dengan mengikutsertakan para pelajar dan mahasiswa Maladewa yang ada di luar negeri, Diperkirakan di tahun 2016 tersebut

⁸⁵ Nigel Morgan, 1998, *Tourism Promotion and Power: Tourism and Tourism Policy Planning*, Honolulu: University of Hawaii Press, hal.129.

⁸⁶ Maldives Ministry of Tourism, “Visit of Maldives”, tersedia online dalam <https://visitmaldives.com/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019.

jumlahnya mencapai 260 orang yang tersebar di berbagai negara dunia.⁸⁷

Kemudian promosi lainnya untuk mendukung perkembangan pariwisata Maladewa juga dijalankan dengan menjadikan kedutaan besar Maladewa di berbagai negara dunia untuk ikut berpartisipasi dalam menyebarkan informasi tentang pariwisata negara ini. Upaya ini cukup efektif karena sebagai contoh di India dan Srilanka peran aktif duta besar ini dapat menjembatani layanan wisata murah yang diikuti oleh wisatawan yang merupakan pegawai pemerintah kedua untuk dapat berkunjung ke Maladewa.⁸⁸

Kesimpulan dari paparan di atas dapat difahami bahwa pasca tahun 2008 pemerintah Maladewa tetap menjalankan kebijakan pariwisata seperti pada periode sebelumnya, hanya saja terdapat perbedaan, dimana kebijakan-kebijakan tersebut tidak lagi bersifat teknis, namun juga politis dan berorientasi pada standarisasi dan ketentuan internasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Maladewa di bawah kepemimpinan Abdullah Yameen dan kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Ibrahim Mohammed Solih telah memenuhi kaidah promosi pariwisata internasional dan dalam negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut dari pengembangan stabilitas politik domestik hingga kerjasama dengan aktor swasta internasional mampu menjadi tolok ukur keberhasilan dari pemerintah Maladewa dalam mengembangkan pariwisata Maladewa sebagai destinasi pariwisata internasional.

Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa kemajuan pariwisata Maladewa tidak lepas kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah pada lingkup domestik dan kebijakan luar negeri. Jika ditarik ke belakang pencapaian ini tidak lepas dari konstelasi politik terkini yang mengarah ke

⁸⁷ Maldives Ministry of Tourism, "MPPRC Ambassador Photography Signing", tersedia online dalam <https://visitmaldives.com/mmprc-photography-ambassador-program-signing-ceremony/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019.

⁸⁸ *Ibid.*

liberalisme internasional. Kesempatan ini kemudian memotivasi pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menumbuh-kembangkan sektor pariwisata yang kemudian berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Maladewa.